

LAPORAN PENELITIAN

**PENELITIAN
PENGEMBANGAN
PERGURUAN TINGGI**

**TANTANGAN DAN STRATEGI PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DALA MENGHADAPI
AKREDITASI 9 KRITERIA (STUDI PADA UIN SUMATERA
UTARA DAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH)**



PENELITI

**Dr. MUHAMMAD DALIMUNTE, S.Ag., S.S., M.HUM (Ketua)
Drs. KASRON NASUTION, M.A (Anggota)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)SUMATERA
UTARA MEDAN TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kontribusi Penelitian	8
1.5. Tinjauan Literatur	8
BAB II	
KAJIAN TEORITIS	10
2.1. Kajian Terdahulu	10
2.2. Pengertian Perguraun Tinggi	13
2.3. Akreditasi	26
2.4. Akreditasi 9 Kriteria	29
2.5. Indikator Penilaian Akreditasi 9 Kriteria	32
BAB III	
METODE PENELITIAN	37
3.1. Pemilihan Lokasi Penelitian.....	37
3.2. Pengumpulan Data.....	38
3.3. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	39
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
3.5. Metode Analisa Data	46
3.6. Sistematika Pembahasan	48

BAB IV

PEMBAHASAN.....	49
4.1. Lembaga Pengelola Akreditasi UIN AR-Raniry Banda Aceh	49
4.2. Peran Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI)	53
4.3. Lembaga pengelola Akreditasi UIN Sumatera Utara	58
4.4. Manajemen dan Strategi PT Dalam Akreditasi 9 Kriteria	59
4.5. Tantangan PT Dalam Akreditasi 9 Kriteria	62

BAB V

KESIMPULAN.....	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2 Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Eksistensi UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sangat mempengaruhi khususnya di wilayah regional Sumatera. Indikator yang dapat dikemukakan antara lain tingginya animo pendaftaran mahasiswa baru dikampus tersebut, UIN Sumatera Utara pada penerimaan mahasiswa tahun terakhir ini menerima jumlah mahasiswa sebanyak 5.575 orang (Humas @uinsu.ac.id) lebih lanjut dijelaskan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada penerimaan tahun sebelumnya. Latar belakang para mahasiswa juga bukan hanya berasal dari Sumatera Utara, banyak juga dari pulau Jawa bahkan luar negeri (humas unsu.ac.id). sama halnya dengan kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh capaian yang didapatkan bahkan Rektor Warul Walidin menyebutkan bahwa kampus tersebut sedang fokus meningkatkan suasana akademik, yang teranyar disampaikan rektor bahwa ia akan mendesak para dosen dan mahasiswa untuk menerbitkan buku sebanyak 1000 buku dalam setahun, yang akan diterbitkan ar-Raniry Press (Waspada.com). melihat fenomena tersebut semangat yang dikedepankan kedua kampus ini tentu untuk meraih nilai akreditasi unggul. Status akreditasi unggul menjadi dambaan semua perguruan tinggi, tidak terkecuali perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dibawah Kementerian Agama.

Perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Sumatera mengharuskan pengelolaan dan manajemen akademik yang bermutu

dengan serius dan bersifat kontinuitas, dengan melibatkan setiap unsur yang terdapat pada perguruan tinggi tersebut. Apalagi persaingan secara global yang tidak bisa dihindarkan bahkan persaingan tersebut terjadi di dalam satu wilayah yang sama, maka sudah saatnya setiap perguruan tinggi memberikan layanan dan penjaminan mutu yang maksimal. Maka dalam perguruan tinggi dikenal standar mutu akademik dan standar pelayanan minimal sebagai fondasi awal dan hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring bahkan evaluasi, audit berbagai data dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program akademik di perguruan tinggi. Perguruan tinggi dalam prosesnya harus melewati penilaian kelayakan teknis/akademik dengan indikator yang telah ditetapkan oleh lembaga penilai, proses ini disebut dengan akreditasi (*accreditation*). Penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan bermutu maka pemerintah melalui PP No. 60 Tahun 1989 disampaikan bahwa BAN-PT merupakan badan yang independen, memiliki wewenang untuk mengakreditasi dan memberikan penilaian pada perguruan tinggi, hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Dalam wewenang yang luas itu, BAN-PT diberi kewenangan mengakreditasi semua institusi pendidikan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, perguruan tinggi dibawah Kementerian Agama bahkan pendidikan tinggi kedinasan.

Perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama maupun PTKIN yang pertama kali berstatus akreditasi unggul adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga sekarang terakreditasi unggul. Ini tertuang dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No: 899/SK/BAN-PT/AK-

ISK/PT/X/2021 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga, tertanggal 12 Oktober 2021-20 Desember 2023. Seperti yang dijelaskan oleh Rektor bahwa UIN Sunan Kalijaga kini memiliki sembilan fakultas dengan 61 program studi (prodi). Dari jumlah itu, 40 sudah terakreditasi A, 1 terakreditasi unggul, dan sekarang akreditasi secara universitas juga unggul. (Humas Kemenag). Adapaun langkah-langkah yang deprogram sesuai keterangan yang disampaikan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga, Muhammad Fakhri Husein menjelaskan, ada sejumlah upaya yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga hingga meraih prestasi akreditasi unggul. Pertama, membangun sistem penjaminan mutu yang terintegrasi. Maksudnya, semua sistem kerja UIN Sunan Kalijaga harus mengarah pada pencapaian standar mutu yang memuat indikator kinerja. Selain itu, seluruh input, proses dan hasil kerja disatukan melalui sistem informasi. (Humas Kemenag)

Capaian status akreditasi universitas UIN Sunan Kalijaga diatas, tentu pada satu sisi memberikan stimulus terhadap perguruan tinggi yang lain, terkhusus PTKIN di Indonesia. Berkenaan dengan itu, landasan yuridis terkait proses akreditasi diatas juga telah ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi serta diundangkannya Permendikbud N0.59 Tahun 2012 tentang Badan Areditasi Nasional, yang menerangkan bahwa fungsi dari BAN-PT mengalami perubahan yang signifikan, faktor penyebabnya adalah dengan dibentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang menanani ilmu-ilmu serumpun. Sejalan dengan amanat UU No 20 tentang sistem pendidikan nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Proses akreditasi dengan 9 kriteria yang dilaksanakan oleh

BAN-PT tentu menarik untuk menelusuri lebih jauh bagaimana tingkat adaptasi kampus perguruan Islam Negeri di wilayah Sumatera ini, selain menyampaikan data yang realistis di masing-masing kampus juga dihasilkan buku berisikan langkah strategis bagi prodi maupun perguruan tinggi dalam menyelesaikan akreditasi 9 kriteria.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab masalah penelitian, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja tantangan yang dihadapi perguruan tinggi keagamaan negeri dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria
2. Bagaimana strategi perguruan tinggi keagamaan negeri dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria.
3. Apa faktor yang mempengaruhi akreditasi 9 kriteria dengan strategi yang dilakukan perguruan tinggi

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diselenggarakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memetakan tingkat kesulitan yang dihadapi perguruan tinggi keagamaan dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria?
2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara akreditasi 9 kriteria dengan kesulitan yang dihadapi perguruan tinggi di wilayah Sumatera
3. Untuk menganalisa bagaimana hubungan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri dengan akreditasi 9 kriteria
4. Untuk merumuskan strategi yang dilakukan perguruan tinggi

dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi beberapa hal penting, yakni secara teoritis maupun praktis:

1. Pemerintah, dalam mendeskripsikan secara komprehensif tantangan perguruan tinggi dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria
2. Pemerintah khususnya pengambil kebijakan akreditasi 9 kriteria melakukan pelatihan dan pendidikan terkait akreditasi 9 kriteria
3. Pemerintah dan perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan program pelaksanaan akreditasi 9 kriteria berorientasi pada kompetensi dan kapabilitas kampus.

1.5 Tinjauan Pustaka

Akreditasi (*accreditation*) sejatinya dipahami sebagai proses penilain kelayakan teknis/akademik dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Defenisi lain dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penetapan dan pengakuan terhadap lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang melalui persyaratan yang telah ditetapkan (KBBI). Adapun Anwar Arifn menjelaskan bahwa akreditasi dipahami sebagai proses penilaian kualitas dengan menggunakan panduan yang baku dan bersifat inklusif. Dalam konteks ini penilaian perguruan tinggi untuk menilai kelayakan dan kelengkapan dokumen untuk memperoleh status akreditasi unggul.

Status akreditasi memberikan manfaat yang sangat luas,

karna menyentuh diberbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, para calon mahasiswa juga para orangtua bahkan sampai kepada pasar industry kerja baik nasional ataupun internasional bahkan yang tidak terelekkkan bagi peningkatan kualitas perguruan tinggi yang sedang mengelola program studi. Lewat proses akreditasi ini pemerintah dalam hal ini kementrian terkait akan semakin mudah menjamin kualitas sutau perguruan tinggi bahkan sebagai legitimasi bagi para lulusan. Selain itu juga pihak pemerintah akan semakin transparan dalam memberian bantuan kepada pihak perguruan tingi.

Entitas perguruan tinggi yang telah terakreditasi secara otomatis menjadi media informasi kepada masyarakat luas. Keterbukaan sebuah layanan dan proses akademik yang baik lewat status pergruan tinggi yang mendapatkan akreditasi akan mendongkark daya saing dengan kampus yang lain. Secara khusus pula manfaat yang sama akan dirasakan oleh perguruan tinggi tentu akan semakin matang dalam perencanaan akademik dan beroritansi pada mutu dan kompetensi yang akan dimiliki setiap lulusan. Kampus juga semakin mudah untuk bermitra, menjalin kerjasama dengan instansi ternama dalam maupun luar negeri. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi prasyarat dalam mewujudkan lembaga yang terakreditasi unggul.. Melalui pearaturan No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional, adapun uraian yang dinalai dalam 9 kriteria yakni: kejelasan visi misi tujuan dan sasaran perguruan tinggi, berikutnya keadaan tata pamong dan kerjasama, kriteria menenai mahasiswa, sumber daya manusia, kondisi laporan keuangan, sarpras, kriterai pendidikan, penelitiin dan pengabdian pada masyarakat. Yang harus dibuktikan dengan luaran dan capainnya

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang gerakan Rohis di sekolah umum yang pernah dilakukan yaitu:

1. Sistem Informasi Borang Akreditasi Program Studi Berbasis Web, Penelitian yang dilakukan oleh Susan Dian Purnamasari. Borang akreditasi program studi digunakan dalam hal penilaian mutu sebuah program studi yang dilakukan oleh BAN PT. dalam konteks mendapatkan nilai yang baik maka pihak program studi melengkapi borang akreditasi prodi merinci berbagai pertanyaan yang telah tersusun baku bagaimana proses berjalannya program studi yang dikelola. Dalam pengisian borang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh BAN PT yakni 7 standar. Meyangkut masalah visi misi prodi, tata pamong dan kepemimpinan publik, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, pengabdian pada masyarakat, penelitian dan kerjasama sama yang dijalin oleh pengelola prodi. Karena antar masing-masing standar saling berkaitan dan mendukung maka harus diformat seluruh datanya berbasis web. Sehingga lebih memudahkan dalam pencarian data dan dokumen dan sebagai bentuk transparansi data. Bahkan sistem penilaian yang digunakan bisa secara otomatis terhadap isian borang yang datanya bersifat kuantitatif. Data isian naratif pada penilaian kualitatif
2. Analisis Kesiapan Akreditasi Berbasis SAPTO Program

Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram, oleh Agil Al Idrus, Karnan. Menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi paling tidak meliputi dua hal yakni SPMI dan SPME. Indikator pertama adalah sistem penjaminan mutu internal dan yang kedua sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Akreditasi yang diperoleh program studi akan menggambarkan baik tidak pengelolaan manajemen dan mutu sebuah prodi. Adapun penjamin mutu yang bersifat eksternal terus berkembang adapun yang berlaku Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online atau lebih dikenal dengan SAPTO. Program studi Biologi merupakan prodi pada FKIP UNRAM yang akan berkaitan dengan sistem SAPTO, harus diakreditasi karena masa berlakunya hampir berakhir. Namun untuk memperoleh nilai yang maksimal harus terjadi kolaborasi yang baik antara prodi dan fakultas karena datanya harus saling melengkapi satu sama lain, dan perlu dilihat kesiapan prodi Biologi dalam menghadapi akreditasi berbasis pada SAPTO dan bagaimana analisa yang mendalam terhadap capaian prodi dibidang akademik, misalnya publikasi penelitian dosen, dibidang pengabdian kepada masyarakat, capaian lulusan mahasiswa sampai pada pengaruh leadership pimpinan di dalam masyarakat. Kegiatan penelitian ini bersifat kualitatif, yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai akhir November 2018 di FKIP Universitas Mataram. Subyek penelitian dan informan dalam penelitian ini adalah dosen pengelola program studi, para dosen dan mahasiswa pada prodi biologi, dengan

teknik pengumpulan data dokumen dan wawancara. Kesimpulannya menunjukkan kondisi program studi dalam menghadapi akreditasi padaposisi kurang siap, bisa dilihat data yang kurang lengkap pada bidang visi misi, tata pamong, bidang mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, mengenai kurikulum, penelitian, penabdian dan data kerjasama. Kenyataan demikian pihak prodi harus memprioritaskan kelengkapan data dan dokumen, memberikan penjelasan yang komprehensif setiap bidang standar.

Berdasarkan penelitian terdahulu belum didapatkan sebuah kajian yang fokus terhadap strategi perguruan tinggi dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria. Oleh karenanya, penelitian yang akan dijalankan ini memiliki nilai kebaruan dengan fokus melihat perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah regional Sumatera, lebih spesifik di UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2.2. Pengertian perguruan Tinggi

Istilah Perguruan Tinggi yang digunakan untuk lapisan ke-2, identik dengan istilah Perguruan Tinggi yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No.30 th 1990, yaitu organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi-fungsi utama Perguruan Tinggi adalah :

1. Membina kualitas hasil dan kinerja Perguruan Tinggi, agar dapat memberi sumbangan yang nyata kepada perkembangan IPOLEKSOSBUD di masyarakat. Untuk dapat melaksanakan pembinaan kualitas yang baik, secara periodik Perguruan Tinggi menyelenggarakan evaluasi-diri yang melibatkan semua Unit Akademik Dasar. Evaluasi-diri sewajarnya dianggap sebagai perangkat manajemen Perguruan Tinggi yang utama, karena setiap pengambilan keputusan harus dapat mengacu pada hasil evaluasi-diri.
2. Merencanakan pengembangan Perguruan Tinggi menghadapi perkembangan di masyarakat. Rencana Strategis menjangkau waktu pengembangan 10 tahun, seyogyanya dapat dibuat oleh Perguruan Tinggi. Dari Rencana Strategis tersebut, dapat dijabarkan Rencana Operasional Lima Tahunan dan Rencana Operasional Tahunan, dan yang terakhir ini mengkaitkan pada Memorandum Program Koordinatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam arti bahwa bagian-bagian Rencana Operasional Tahunan yang memerlukan anggaran pembangunan, dapat diajukan sebagai Daftar Isian Proyek.

3. Mengupayakan tersedianya sumberdaya untuk menyelenggarakan tugastugas fungsional dan rencana perkembangan Perguruan Tinggi. 2 Sumberdaya diupayakan, tidak hanya Otoritas Pusat, tetapi juga dari pihak-pihak lain melalui kerjasama, kontrak penelitian, penyediaan pendidikan dan pelatihan khusus, sumbangan dan lain-lain.

Menyelenggarakan pola manajemen Perguruan Tinggi, yang dilandasi Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi, dengan sasaran utama adanya suasana akademik yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan fungsional pendidikan tinggi Perguruan Tinggi merupakan wadah bagi masyarakat kampus. Sebagai suatu organisasi maka perguruan tinggi mempunyai (1) struktur, (2) aturan penyelesaian tugas, yang mencakup pembagian tugas antar kelompok fungsional dan antar warga dalam kelompok yang sama, (3) rencana kegiatan, dan (4) tujuan. Tujuan dibimbing oleh asas dan membimbing rencana kegiatan. Struktur dan aturan penyelesaian tugas menjadi prasarana pencapaian tujuan dan sekaligus mencerminkan asas. Perguruan tinggi sebagai masyarakat tidak terlepas dari suatu masyarakat besar yang menjadi lingkungannya (pengertian atau ungkapan universal), atau yang menjadi induknya (pengertian atau ungkapan paternalistik). Dalam hal Indonesia, yang kebanyakan warganya sangat cenderung pada paternalisme, masyarakat perguruan tinggi menjadi anak masyarakat besar Indonesia. Penempatan dan penyesuaian diri masyarakat kampus pada masyarakat besar Indonesia lebih banyak berlangsung secara formalistic (melalui ketentuan, peraturan, undang-undang yang bermaksud baik) daripada secara ekologi. Fakta ini berpengaruh jelas pada penjabaran asas menjadi tujuan dan selanjutnya pada penjabaran tujuan menjadi tugas pokok. Barangkali pengaruh fakta ini sampai pula mencapai asas.

Adapun dalam sejarah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Indonesia Pada perkembangannya tanggal 24 Agustus 1960 diresmikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Yogyakarta sebagai gabungan antara PTAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta. IAIN bermula dengan dua bagian, yaitu dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta. Di kedua tempat ini, IAIN dengan cepat berkembang menjadi sebuah institut dengan empat fakultas, yang pada tiap fakultasnya ditetapkan kuliah selama 3 tahun dan dapat dilengkapai dengan spesialisasi 2 tahun. IAIN pada tahap awal berdirinya berdasarkan penetapan Menteri Agama RI Nomor 43 tahun 1960 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1961 terdiri atas Fakultas Tarbiyah sebanyak delapan jurusan yaitu: 1) Jurusan Pendidikan Agama, 2) Jurusan Paedagogik, 3) Jurusan Bahasa Indonesia, 4) Jurusan Bahasa Arab, 5) Jurusan Bahasa Inggris, 6) Jurusan Khusus (Iman Tentara), 7) Jurusan Etnologi dan Sosiologi, 8) Jurusan Hukum dan Ekonomi.

Perkembangan selanjutnya delapan jurusan ini mengecil dan hanya bertahan dua jurusan saja yaitu Jurusan Pendidikan Agama dan Pendidikan Bahasa Arab. Sekitar tahun 1980-an lahirlah Jurusan Tadris, Jurusan ini bertujuan untuk merespon. Pada perkembangan berikutnya pada tanggal 24 Agustus 1960 diresmikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Yogyakarta sebagai gabungan antara PTAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta. IAIN bermula dengan dua bagian, yaitu dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta. Di kedua tempat ini, IAIN dengan cepat berkembang menjadi sebuah institut dengan empat fakultas, yang pada tiap fakultasnya ditetapkan kuliah selama 3

tahun dan dapat dilengkapai dengan spesialisasi 2 tahun. IAIN pada tahap awal berdirinya berdasarkan penetapan Menteri Agama RI Nomor 43 tahun 1960 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1961 terdiri atas Fakultas Tarbiyah sebanyak delapan jurusan yaitu: 1) Jurusan Pendidikan Agama, 2) Jurusan Paedagogik, 3) Jurusan Bahasa Indonesia, 4) Jurusan Bahasa Arab, 5) Jurusan Bahasa Inggris, 6) Jurusan Khusus (Iman Tentara), 7) Jurusan Etnologi dan Sosiologi, 8) Jurusan Hukum dan Ekonomi²⁶ . Perkembangan selanjutnya delapan jurusan ini mengecil dan hanya bertahan dua jurusan saja yaitu Jurusan Pendidikan Agama dan Pendidikan Bahasa Arab. Sekitar tahun 1980-an lahirlah Jurusan Tadris, Jurusan ini bertujuan untuk merespon kekurangan dan kebutuhan guru-guru dalam mats pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris.

Kemudian pada tahun 1990-an muncul jurusan baru yaitu Kependidikan Islam (KI). Sebagai lembaga pendidikan tinggi di tingkat Institut, IAIN mengkhususkan pembelajaran sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Setidaknya perkembangan puncak dari IAIN sebelum di antaranya beralih status memiliki lima fakultas agama yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin. Pengkhususan ini sesuai dengan amanat PP No. 30 Tahun 1990 yang disempurnakan dengan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang membatasi ruang kerja dari sebuah lembaga pendidikan tinggi setingkat institut. Dalam Bab III Pasal 6 ayat 5 dijelaskan bahwa institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.

Setelah melalui fase-fase perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia hingga kini lembaga pendidikan tersebut dapat dikategorikan kepada tiga macam: 1. Lembaga pendidikan tinggi Islam negeri, yakni UIN, IAIN, dan STAIN. 2. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk universitas di lembaga ini dikembangkan berbagai fakultas, jurusan, serta program studi. 3. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk institut dan sekolah tinggi. Dalam perkembangannya selanjutnya, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Hingga akhir abad ke-20, telah ada 14 IAIN. Perkembangan dari cabang-cabang IAIN bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah manajerial IAIN, dilakukan rasionalisasi organisasi.

Pada tahun 1997 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri, di luar 14 IAIN yang ada, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997. Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman. UIN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Cikal bakal UIN adalah IAIN yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1960 di kota Yogyakarta dengan nama IAIN Al Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah, yakni gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta. Sejak tahun 1963, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat.

Berdirinya IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973 merupakan perkembangan natural dari kemajuan pendidikan di Sumatera Utara, Dari perspektif sejarah, keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dilatari oleh dua faktor. Pertama, bahwa perguruan tinggi Islam yang berstatus negeri saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, pertumbuhan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan yang sederajat dengan SLTA berkembang pesat di daerah ini, yang pada gilirannya memerlukan adanya lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1970-an, jumlah alumni pendidikan madrasah dan pondok pesantren yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi semakin meningkat. Karenanya, kehadiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di wilayah Sumatera Utara terasa semakin mendesak dan sangat penting. Hal itu terlebih-lebih mempertimbangkan bahwa di berbagai kota lain di Indonesia telah terlebih dahulu berdiri sejumlah IAIN. Karena dukungan bagi berdirinya IAIN Sumatera Utara datang dari berbagai segmen masyarakat Sumatera Utara, mulai dari Pemerintah Daerah, kalangan perguruan tinggi, ulama, dan tokoh masyarakat. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara, yang saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk panitia Pendirian yang di ketuai oleh letkol Inf. Raja Syahnan pada tanggal 24 Oktober 1960.

Kesadaran atas kurangnya tenaga ahli di bidang syari'ah dan hukum Islam mendorong berbagai pihak, terutama yang bernaung di bawah yayasan K.H Zainul Arifin, untuk membuka Fakultas Syari'ah di Medan pada tahun 1967. Menteri Agama RI mengambil kebijakan

untuk menyatukan Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah tersebut. Peresmian penegerian kedua Fakultas dilakukan pada sabtu 12 Oktober 1968 bertepatan dengan 20 Rajab 1389 H langsung oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Upacara dilalukan di Aula Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh Masyarakat, pembesar sipil dan militer, dan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara ini juga langsung dilantik Drs. Hasbi AR sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah dan T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan SK Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225 tahun 1968.

Walaupun sejak 12 Oktober 1968 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dua Fakultas Agama, Tarbiyah dan Syari'ah yang berstatus negeri, namun keduanya masih merupakan Fakultas cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kondisi ini meningkatkan semangat umat Islam Sumatera Utara untuk bisa mewujudkan IAIN yang berdiri sendiri di daerah ini. Semangat ini didukung oleh berbagai organisasi Islam, organisasi pemuda dan mahasiswa, serta mendapat respon positif dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI. Respon positif ini diwujudkan secara kongkrit antara lain dengan menyiapkan lahan dan membangun gedung perkantoran, perkuliahan, perpustakaan, sarana dan prasarana lainnya.

Akhirnya tepat pada jam 10.00 WIB, Senin 25 Syawal 1393 H bertepatan dengan 19 Nopember 1973 M, IAIN Sumatera Utara resmi berdiri yang ditandai dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Mukti Ali. Sejak saat itu resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang berada di Medan menjadi

bagian dari IAIN Sumatera Utara yang berdiri sendiri. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin yang ada di Pandangsidempuan, yang selama ini menjadi cabang dari IAIN Imam Bonjol Padang juga menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang merupakan IAIN ke-14 di Indonesia. Pada tahun 1983, jurusan Dakwah yang semula bagian dari Fakultas Ushuluddin ditingkatkan menjadi Fakultas Dakwah. Sejak itu IAIN Sumatera Utara mengasuh 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Pandangsidempuan.

Pada awal berdirinya, IAIN Sumatera Utara hanya membuka dua Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah yang berinduk ke IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Fakultas Tarbiyah yang berinduk ke IAIN Imam Bonjol Padang. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, dua fakultas di atas menjadi Fakultas yang berdiri sendiri, terpisah dari IAIN Ar-Raniry dan Imam Bonjol. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) jenjang Strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Kemudian pada tahun 2004 dibuka pula Program Pascasarjana untuk jenjang strata tiga (S3). Pada awalnya Program Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jln. Sutomo Medan, tetapi kemudian pada tahun 1998 dibangun kampus baru di pondok surya Helvetia Medan. Sekarang PPS IAIN SU sudah mengasuh 6 (enam) Program Studi S2 (Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam dan Tafsir Hadis), serta 4 Program Studi S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam dan Komunikasi Islam.

Dalam perkembangan saat ini, IAIN Sumatera Utara telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009, tanggal 13 Maret 2009 tentang penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian, pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 117 Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, IAIN Sumatera Utara kini sudah berstatus PK BLU.

Ketika awal berdirinya di tahun 1973, IAIN Sumatera Utara hanya mengemban misi sebagai institusi perguruan tinggi agama Islam yang mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti 'ulum al-diniyah, seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, Akhlaq, Tasawuf, Bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman lain dalam arti konvensional. Namun kemudian, seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, maka pada era 1990-an IAIN Sumatera Utara dikembangkan menjadi institusi perguruan tinggi agama Islam yang diberi status wider mandate atau perguruan tinggi agama Islam dengan mandat yang diperluas. Perkembangan ini ditandai dengan dibukanya sejumlah program studi baru diluar batas ilmu-ilmu keislaman konvensional. Sejak saat itu dimulailah era peralihan kajian ilmu-ilmu keislaman dari ulum al-diniyah ke dirasah islamiyah. Awalnya di Fakultas Tarbiyah dibukalah jurusan tadris IPA, Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dalam perkembangan selanjutnya, di Fakultas Syariah di buka pula jurusan Ekonomi Islam dengan sejumlah program studinya. Di Fakultas Dakwah dibuka jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah dan bimbingan

Penyuluhan. Kemudian di Fakultas Ushuluddin dibuka pula jurusan Politik Islam.

Selanjutnya pada era tahun 2000-an, perkembangan IAIN Sumatera Utara memasuki babak baru yang ditandai dengan peralihan dari *wider mandate* ke integrasi keilmuan. Dalam filosofi integrasi keilmuan, semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai segala sesuatu yang berasal dari Tuhan yang mewujudkan dalam bentuk ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Seiring dengan itu, pola kajian keilmuan IAIN Sumatera Utara pun bukan lagi sebatas mono disiplin dan multi disiplin, tetapi berkembang menjadi inter disiplin dan trans disiplin. Sebagai upaya untuk pengembangan, pimpinan dan segenap sivitas akademika telah bertekad untuk mengalih statuskan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Berbagai upaya telah dilakukan untuk memuluskan rencana tersebut. Perkembangan terakhir, proposal alih status tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, usulan alih status tersebut sedang diproses di Sekretariat Negara untuk mendapatkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Seiring dengan rencana alih status tersebut, maka secara internal IAIN Sumatera Utara terus berupaya membenahi diri, baik dalam konteks akademik, administratif, maupun sarana dan prasarana kelembagaan. Secara eksternal, upaya tersebut telah mendapatkan komitmen bantuan pendanaan dari Islamic Development Bank (IsDB)

dan Government of Indonesia (GoI) yang saat ini sudah mulai dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pengembangan akademik dan kelembagaan kampus. Dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara, IAIN SU telah mendapatkan komitmen pengadaan area kampus baru seluas 400 hektar untuk pembangunan kampus terpadu di masa depan. Untuk mewujudkan semua itu tentu dibutuhkan kontribusi masyarakat dan sivitas akademika bagi mendorong pengembangan IAIN/UIN Sumatera Utara kearah yang lebih baik, maju, dan berkualitas. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan atas berkat doa semua civitas akademika, alih status IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara telah disetujui dengan Perpres No. 131/2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Awal Lahirnya IAIN Ar-Raniry dengan berdirinya Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta. Masih pada tahun 1962 didirikan pula Fakultas Ushuluddin sebagai Fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, fakultas Syariah, Tarbiyah dan Ushuluddin berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan. Pada tanggal 5 Oktober 1963 IAIN Ar-Raniry resmi berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri. IAIN adalah singkatan dari Institut Agama Islam Negeri dan kata Ar-Raniry yang dinisbahkan kepada IAIN Banda Aceh adalah nama seorang Ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (memerintah tahun 1637-1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal

dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Beliau telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.

AIN Ar-Raniry menjadi IAIN ketiga di nusantara setelah IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awal diresmikan baru memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1968 tepatnya 5 tahun IAIN Ar-Raniry, diresmikan pula Fakultas Dakwah sekaligus menjadi fakultas pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1968 ini pula, IAIN Ar-Raniry ditunjuk sebagai induk dari dua fakultas agama berstatus negeri di Medan (cikal bakal IAIN Sumatera Utara) yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah yang berlangsung selama 5 tahun. Sementara pada tahun 1983 Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan IAIN Ar-Raniry. Pada tahun pertama kelahirannya, IAIN masih mengharapkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat Aceh, terutama dari sisi kebutuhan belajar mengajar. Diibaratkan anak baru lahir, semuanya harus diurus oleh orang tuanya. Dalam konteks masa itu, seluruh lapisan masyarakat Aceh harus mampu memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk keperluan pendidikan di IAIN. Seperti yang tertulis dalam laporan yang ditandatangani oleh kuasa Rektor I Drs. H. Ismail Muhammad Sjah.

Presiden Sukarno dalam sambutan dies natalis pertama IAIN Ar-Raniry menyampaikan bahwa di Aceh harus melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang mampu meneruskan rovolusi dan perjuangan bangsa serta setia kepada Pancasila sebagai haluan negara. IAIN harus

menjadi tempat penggodok kader revolusi yang menjaga jiwa toleransi dan persatuan bangsa. Semua itu harus tertanam dalam jiwa pendidik, pengajar dan mahasiswanya. Mengikuti perkembangannya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, IAIN telah menunjukkan peran dan signifikansinya yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Lulusannya mampu mengemban amanah diberbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Alumni telah berkiprah di berbagai profesi, baik yang berkaitan dengan sosial keagamaan, maupun yang berhubungan dengan aspek publik lainnya. Lembaga ini telah melahirkan banyak pemimpin di daerah ini, baik pemimpin formal maupun informal. Tepat pada 5 Oktober 2013 genab berumur 50 tahun, biasanya tahun ini disebut tahun emas. Bertepatan dengan tahun tersebut Perguruan Tinggi ini akan merubah wajah dan namanya dari Institutut menjadi Universitas melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry).

Dengan demikian maka mulai 1 Oktober 2013 juga nama IAIN Ar-Raniry mulai terhapus secara legalitas, dan lama kelamaan juga akan terhapus sedikit demi sedikit dari dalam hati masyarakat Aceh secara khusus, dan masyarakat Indonesia, serta masyarakat lainnya di belahan dunia secara umum. Untuk itu, agar anak cucu penerus bangsa dapat mengetahui bahwa pernah ada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry yang jaya di bumi Aceh dan telah banyak melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang potensial dalam bidangnya dan juga telah banyak melahirkan Perguruan Tinggi Agama Islam lain baik Negeri maupun swasta, maka perlu ada catatan yang lengkap tertulis dalam

dokumen sejarah melalui berbagai media cetak, media elektronik dan media lainnya yang relevan.

2.3 Akreditasi

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, Pasal 1, dan ayat 32 dikemukakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat 1, 2, 3 dan 4 lebih diperjelas bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan yang berada pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan (formal dan non formal), sedangkan untuk program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi (Undang-Undang No. 20, 2003).

Selanjutnya proses akreditasi dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas keterbukaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari akreditasi adalah suatu proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan, hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya. Hasil penelitian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan pengakuan terakreditasi dapat diperingkat menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C) (BAN-PT, 2009).

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai kelayakan dan mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (judgements of informed experts). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi. Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Kriteria akreditasi adalah patokan akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (compliance), namun juga menilai kinerja (performance) perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut: 1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (outcome-based accreditation), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional

(international outlook). Outcome-based accreditation yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. 2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (compliance) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (conformance) yang diukur melalui kinerja mutu (performance) dalam konteks akuntabilitas publik; Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi adalah: a) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b) Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; c) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; d) Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; f) Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

2.4 Akreditasi 9 Kriteria

Dasar hukum tertuang dalam Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Pasal 7: Ayat (1): Akreditasi Program Studi dan PerguruanTinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Ayat (2): Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. instrumen

akreditasi untuk Perguruan Tinggi. Ayat (3): Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Ayat (4) : Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan: a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi; b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan; c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan d. hal-hal khusus Ayat (5) : Instrumen akreditasi PerguruanTinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Pasal 10. Pasal 10 BAN-PT bertugas dan berwenang dalam menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi. ` Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, BAN-PT menetapkan instrumen akreditasi yang mencakup instrumen akreditasi program studi dan instrumen akreditasi perguruan tinggi. Instrumen akreditasi perguruan tinggi disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kekhususan sistem tata kelola perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Instrumen akreditasi program studi disusun dengan mempertimbangkan jenis dan jenjang pendidikan, modus pembelajaran, dan kekhususan program studi. Instrumen akreditasi program studi terdiri dari instrumen yang menilai hal-hal yang bersifat umum lintas program studi (generik) dan instrumen penilaian tentang kekhususan program studi (spesifik).

Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen PerBANNo 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi.

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (outcome-based accreditation), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (international outlook) pada program studi dan institusi perguruan tinggi.
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (compliance) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (performance) dalam konteks akuntabilitas publik;
3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi;
4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (evidence-based) serta ketertelusuran (traceability) dari setiap aspek penilaian;
5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAM atau BAN-PT. Format terstandar dapat berupa Format Isian (borang) input, proses, output dan outcome (kinerja) dan/atau Format Evaluasi Diri (Self Assessment Report).
7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian;

8. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (importance) dan relevansi tinggi (relevance) terhadap mutu pendidikan tinggi;
9. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi.

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi:

1. mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

2.5 Indikator Penilaian Akreditasi 9 Kriteria

Dalam penilaian indikator, bahwa persiapan Asesmen lapangan 1. LAM-PTKes Dalam rangka persiapan asesmen lapangan LAM-PTKes melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Penyampaian jadwal pelaksanaan asesmen lapangan; b. Penyiapan surat tugas asesmen lapangan; c. Penyampaian surat tugas asesmen lapangan kepada asesor dan program studi; d. Penggantian biaya tiket dan hotel. Asesor Dalam rangka persiapan asesmen lapangan, tim asesor melakukan hal-hal berikut: a. Membuat catatan hasil asesmen dokumen akreditasi pada saat asesmen kecukupan dengan menggunakan format yang disediakan dan hal-hal yang perlu diverifikasi pada saat pelaksanaan asesmen lapangan; b. Menyusun langkah-langkah kegiatan, jadwal dan target asesmen lapangan; c. Melakukan verifikasi dan validasi tugas secara bersama – sama

anggota tim asesor pada saat pelaksanaan asesmen lapangan; d. Membagi tugas khusus di dalam menyiapkan laporan hasil asesmen lapangan, kemudian disatukan untuk dibahas bersama tim asesor; e. Unit Pengelola Program Studi Program studi Dalam rangka persiapan asesmen lapangan, program studi melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menyiapkan ruangan khusus di kampus yang digunakan untuk kerja tim asesor; b. Menyiapkan bantuan teknis kepada tim asesor; c. Menyiapkan bahan presentasi, dan dokumen yang diperlukan sebagai bukti.

Tim Asesor diharapkan memberikan pertimbangan pakar (expert judgment) dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif mengenai masukan, proses dan luaran, dengan menggunakan indikator berikut :

Relevansi

Relevansi adalah tingkat keterkaitan hasil/luaran dengan tujuan program studi dan tuntutan masyarakat nasional maupun internasional, yang terwujud dalam upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengupayakan peningkatan kemungkinan lulusan untuk dipekerjakan, peningkatan gaji permulaan bagi lulusan, perpendekan masa tunggu lulusan untuk memperoleh dan memulai pekerjaan, dan memperbaiki hubungan antara program studi dengan bidang pekerjaan; sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dalam pasar kerja.

Suasana Akademik

Suasana akademik merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik merupakan fungsi kepemimpinan dan manajemen program studi yang berkenaan dengan perbaikan proses pembelajaran, termasuk manajemen pengembangan dan implementasi kurikulum, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, dengan penyediaan sumber daya yang bermutu. Suasana akademik dikembangkan melalui: hubungan yang sehat antara dosen, mahasiswa, antara para dosen, antara mahasiswa; hubungan yang sehat untuk mengembangkan mutu proses pendidikan yang didukung oleh semua staf pengajar dan staf administrasi; keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua kehidupan akademik; semangat dan motivasi semua dosen untuk bekerja dalam semua kegiatan akademik; keterlibatan masyarakat dalam proses akademik dan pembelajaran.

Manajemen Internal

Manajemen internal adalah upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk: memperbaiki manajemen dan organisasi; memperbaiki semangat dan motivasi staf; menata alokasi/mekanisme pendanaan yang lebih baik; mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya; aliran sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan program; pendekatan dari bawah ke atas untuk mengembangkan rencana; dan inisiatif serta tanggung jawab setiap unsur. Keberlanjutan Keberlanjutan upaya unit pengelola program studi untuk program studi mempertahankan kelanggengan penyelenggaraan program studi, yang mencakup penyelenggaraan sistem karier dan upaya menyediakan pekerjaan bagi lulusan; pemberdayaan partisipasi masyarakat; mengembangkan dan memanfaatkan jaringan kerja sama dan kemitraan; membangun dan memanfaatkan dukungan wilayah regional. Efisiensi dan Efektivitas Efisiensi dan efektivitas berkenaan dengan upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, melalui interaksi kelas; pembelajaran di perpustakaan; pekerjaan laboratorium dan tugas akhir. Penyelenggaraan program bantuan bagi mahasiswa, tutorial dan tugas di luar kelas; akses kepada rujukan dan sumber di luar program studi; interaksi teman sebaya; dan kegiatan di laboratorium bahasa. Membangun sistem

evaluasi yang objektif, komprehensif dan transparan; serta menyelenggarakan sertifikasi bagi lulusan.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan: keseluruhan pendirian individu kunci, yaitu personil dalam organisasi, yang terlibat dalam perumusan, operasi, dan interaksi dengan lingkungan; kekuatan visi yang memberikan arah pada penyusunan rencana pengembangan, membimbing pelaksanaan rencana ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; komitmen kelembagaan; pengembangan hubungan dan nilai kompetitif yang memperlihatkan nilai tambah dan kompetitif. Dalam rangka pengelolaan program studi, berbagai elemen kepemimpinan itu diwujudkan dalam pengelolaan kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang didukung oleh penyediaan sumber daya yang bermutu.

Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru)

Aksesibilitas dan pemerataan pendidikan adalah kondisi yang memungkinkan peningkatan dan pemerataan kesempatan calon mahasiswa untuk memasuki program studi, terutama calon mahasiswa yang tidak beruntung secara ekonomis, dan partisipasi serta kesempatan kaum perempuan untuk belajar pada tingkat pendidikan tinggi; meningkatkan kapasitas penerimaan calon mahasiswa; dan meningkatkan upaya penelurusan bakat calon mahasiswa secara terbuka. Untuk membantu asesor memberikan penilaian secara objektif, LAM-PTKes menyiapkan kriteria penilaian yang terdiri atas kriteria umum dan kriteria khusus, yang disajikan di dalam Buku IV – Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Magister Herbal.

Dalam pelaksanaan wawancara • Wawancara dengan Dosen. Meliputi:

1. Kepemimpinan
2. Suasana kerja
3. Hubungan dengan pimpinan dan sesama anggota
4. Beban kerja
5. Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor
6. Masalah akademik lain yang relevan
7. Prasarana dan sarana akademik
8. Pelayanan administrasi terhadap dosen.

Wawancara dengan Pimpinan Program Studi. Antara lain:

1. Suasana kerja
2. Hubungan pimpinan dan bawahan
3. Hubungan antara sesama sivitas akademika
4. Beban kerja
5. Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor
6. Kelengkapan prasarana dan sarana

Wawancara dengan Mahasiswa. Antara lain:

1. Suasana belajar
2. Kelengkapan prasarana dan sarana akademik
3. Kepuasan belajar
4. Fasilitas kemahasiswaan (asrama, klinik, fasilitas olahraga, fasilitas hiburan, dll.)
5. Organisasi mahasiswa
6. Layanan bantuan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dsb.)
7. Informasi karier dan pasar kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana jenis penelitiannya adalah studi kasus (case study), dimana penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan dan penyusunan boring akreditasi 9 kriteria di PTKIN, yakni UIN Sumatera Utara Medan dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3.1. Pemilihan lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada 2 PTKIN di Pulau Sumatera, yakni UIN Sumatera Utara Medan dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini paling tidak disebabkan bahwa eksistensi UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sangat mempengaruhi khususnya di wilayah regional Sumatera. Indikator yang dapat dikemukakan antara lain tingginya animo pendaftaran mahasiswa baru dikampus tersebut, UIN Sumatera Utara pada penerimaan mahasiswa tahun terakhir ini menerima jumlah mahasiswa sebanyak 5.575 orang (Humas @uinsu.ac.id) lebih lanjut dijelaskan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada penerimaan tahun sebelumnya. Latar belakang para mahasiswa juga bukan hanya berasal dari Sumatera Utara, banyak juga dari pulau Jawa bahkan luar negeri. sama halnya dengan kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh capaian yang didapatkan bahkan Rektor Warul Walidin menyebutkan bahwa kampus tersebut sedang fokus meningkatkan suasana akademik, yang teranyar disampaikan

rektor bahwa ia akan mendesak para dosen dan mahasiswa untuk menerbitkan buku sebanyak 1000 buku dalam setahun, yang akan diterbitkan ar-Raniry Press (Waspada.com). melihat fenomena tersebut semangat yang dikedepankan kedua kampus ini tentu untuk meraih nilai akreditasi unggul. Status akreditasi unggul menjadi dambaan semua perguruan tinggi, tidak terkecuali perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dibawah Kementerian Agama. pemilihan lokasi harus didasarkan pada argumentasi yang kuat. Penelitian kualitatif mendasarkan pada argumen peneliti mulai dari alasan objektif, hasil refleksi maupun hasil dari kajian terdahulu. Kesemua itu dapat menjadi dasar bagi peneliti dalam menentukan objek wilayah.

Dalam penelitian bagaimana tantangan yang hadapi perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri di Sumatera dalam menghadapi dan Menyusun boring akreditasi 9 kriteria tentu pemilihan ini tentu dilakukan setelah adanya studi pendahuluan tentang kenapa perguruan tinggi ini menjadi lokasi penelitian.

3.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan; 1) FGD (Focus Group Discussion), dimana merupakan kegiatan wawancara dengan sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu untuk melihat persepsi antar individu; 2) Observasi secara langsung melihat bagaimana kampus dan prodi menyusun boring akreditasi; 3) Dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan data mengenai kegiatan terkait strategi dan

tantangan yang dihadapi baik perguruan tinggi maupun program studi dalam menyelesaikan dokumen-dokumen borang akreditasi.

3.3. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan beragam kategori yang muncul dari kegiatan kampus dan program studi dimulai dari strategi dan manajemen yang dilaksanakan dalam konteks penyusunan borang akreditasi Baik pada tingkat perguruan tinggi maupun di program studi. Kemudian peneliti akan menganalisa persepsi yang muncul dari uraian dan narasi dari peserta maupun obyek penelitian.

Untuk membedah topik penelitian ini, penulis menggunakan 3 kategori penjelasan, yaitu: 1) jenis penelitian; 2) Teknik pengumpulan data; 3) Metode analisis data;

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang pendirian obyek penelitian, kondisi atau keadaan sekarang, interaksi lingkungan pesantren dengan lingkungan institusi sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Selain itu, peneliti juga menggunakan *library research* sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini. Penggunaan *library research* diupayakan dapat membantu dalam menemukan hal-hal yang belum terjawab dan melengkapi hasil wawancara yang dilakukan sehingga semua pertanyaan di fokus masalah dapat terjawab dengan baik. Dalam penelitian kualitatif, data dan informasi diperoleh kemudian diorganisir dan

dianalisis untuk mendapat gambaran (deskripsi) tentang objek penelitian.

Dari pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diorganisir dan dianalisis guna mendapat gambaran (deskripsi) tentang objek penelitian. Cara pengolahan data dan informasi yang demikian itu, kemudian diistilahkan dengan metode deskriptif analitis. Mengenai metode ini, Winarno Surachmad⁶ menjelaskan bahwa, Metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi: analisis dan interpretasi tentang arti data itu, membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis, maka data yang akan digunakan adalah data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan

⁶Winarno Surachmad, *Pengantar penelitian ilmiah : dasar, metode dan teknik*. (Bandung: Tarsito, 1989), hal. 139.

bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.”⁷

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pertimbangan wawancara ditetapkan sebagai tehnik pengumpulan data yakni : (1) orang mempersepsi objek, peristiwa dan tindakan, kemudian maknanya ditangkap melalui pandangannya, (2) sumber data (orang) yang representatif dapat mengungkapkan gambaran peristiwa, tindakan atau subyek yang telah lama dikenalnya. Berkaitan dengan objek penelitian. Sugiyono menjelaskan adanya tiga komponen, yakni: 1) *Place*, gambaran keadaan tempat di mana interaksi dalam

⁷Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 284.

situasi sosial sedang berlangsung; 2) *Actor*, pelaku pada suatu situasi sosial termasuk karakteristik yang melekat pada mereka atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu; 3) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.⁸

Target responden wawancara diantaranya adalah: 1) institusi pendidikan yaitu: pimpinan lembaga, meliputi guru agama dan aktivis ROHIS; 2) institusi sosial meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat yang berkaitan dengan aspek akses informasi keagamaan dikalangan pelajar.

Oleh karena itu, wawancara terhadap orang yang representatif untuk suatu persoalan adalah penting untuk mengungkapkan dimensi masalah yang diteliti. Pertimbangan lain mengenai penggunaan teknik wawancara, teknik ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : (1) peneliti dapat melakukan kontak secara langsung dengan responden sehingga memungkinkan didapatkan jawaban secara bebas dan mendalam, (2) hubungan dapat dibina lebih baik, sehingga memungkinkan responden bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas, (3) untuk pertanyaan dan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 19.

pernyataan yang kurang jelas dari kedua belah pihak dapat diulangi kembali. Bentuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti berupa wawancara bebas (tak berstruktur), mengingat peneliti memiliki hubungan sosial yang cukup baik dengan responden. Wawancara tak berstruktur bersifat luwes dan terbuka dimana memungkinkan pertanyaan yang diajukan, muatannya dan rumusan kata-katanya disusun sendiri oleh peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Pada awalnya wawancara dilaksanakan dengan tidak berstruktur, karena masih bersifat umum dan belum terfokus dan hanya terpusat kepada satu pokok masalah tertentu, serta wawancara bebas yang berisi pertanyaan yang berpindah-pindah dari satu pokok masalah kepada masalah yang lain, sepanjang berkaitan dengan aspek-aspek masalah penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan sekolah dan tempat aktivitas yang disebutkan oleh informan seperti rumah ibadah. Observasi dilakukan untuk melihat berbagai kegiatan dan sarana yang ada. Dalam observasi, penulis juga mengikuti kegiatan-kegiatan secara langsung mekanisme dalam perguruan tinggi terkait penyusunan borang akreditasi. Observasi lebih ditekankan pada pengamatan dengan

teknik peneliti tinggal beberapa hari dilokasi penelitian dan melakukan kontak langsung secara natural untuk memahami kondisi dan situasi secara detail.

3. Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Studi dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Dokumen meliputi arsip-arsip dan buku (kitab) yang menjadi referensi bacaan. Studi kepustakaan yakni menelaah berbagai macam pustaka yang relevan terutama berkenaan dengan konsep-konsep, dan stratgei, manajemen kampus dan program studi menyelesaikan penyusunan boring akreditasi 9 kriteria.

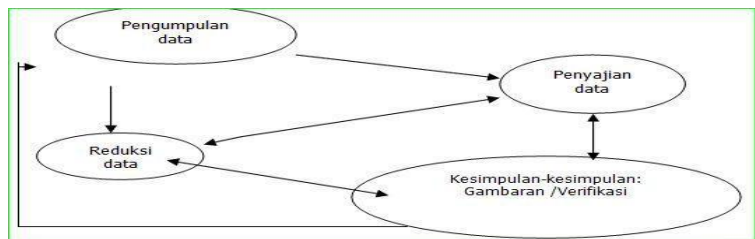
3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Reduksi data (*data reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Selanjutnya tahapan proses analisis data yaitu *data display*. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan *display data*, memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Untuk melengkapi teks analisis naratif, disertakan juga bagan, tabel dan gambar sebagai penunjang data. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas yang berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini bahwa proses analisis dilakukan semenjak data awal dikumpulkan. Oleh karena itu kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat tentatif atau kabur. Agar kesimpulan lebih “grounded” maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan member check, triangulasi dan “audit trail”. Berikut adalah diagram tentang analisa data menurut Milles dan Huberman

bagan 1. analisis data



¹² Sugiyono, *Metode Penelitian...* hal. 253.

3.6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun dalam sistematika pembahasan ini, memasuki Bab I, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan tinjauan literatur.

Bab II. Diuraikan secara detail kaji teoritis. Meliputi kajian terdahulu, pengertian perguruan tinggi, akreditasi, akreditasi 9 kriteria dan apa saja yang menjadi indikator akreditasi 9 kriteria.

Bab III. Metode penelitian. Antara lain Pemilihan lokasi penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data, serta sistematika pembahasan.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Antara lain. Lembaga pengelola akreditasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lembaga pengelola akreditasi UIN Sumatera Utara. Manajemen dan strategi PT dalam akreditasi 9 kriteria. Tantangan PT dalam akreditasi 9 kriteria dan Analisa hasil visitasi akreditasi 0 kriteria pada PTKIN.

Bab V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1.1 Lembaga Pengelola Akreditasi UIN Banda Aceh

Pendampingan terhadap penyusunan borang akreditasi 9 kriteria pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh berada pada tugas dan fungsinya Lembaga Penjamin Mutu (LPM). Karena jika dilihat keseluruhan tugas dari LPM antara lain. Memastikan pelaksanaan system penjaminan mutu;, Merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses penjaminan mutu;, Mengorganisir pekerjaan yang ada di lingkungan LPM, Mengontrol proses penjaminan mutu dan kinerja anggota LPM, Mengevaluasi proses penjaminan mutu untuk perbaikan secara terus menerus, Mengoordinir semua kegiatan LPM, Memimpin rapat pleno atas semua draft proses penjaminan mutu, Mengesahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota LPM, Melaksanakan kerjasama dengan institusi lain dan stakeholders. Keseluruhan tugas tersebut tidak keluar dari kualitas mutu akademik perguruan tinggi, dalam hal ini termasuk borang akreditasi.

Perjalanan perguruan tinggi ini dijelaskan bawa, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh ditingkatkan statusnya menjadi universitas berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013. UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang Program Sarjana (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui 51 Program Studi (Prodi) yang tersebar di 9 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana dalam rumpun keilmuan kelompok ilmu agama Islam, kelompok ilmu sosial danhumaniora, dan kelompok ilmu sains dan teknologi. Sejak tahun 2011, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh telah ditetapkan

sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTK-BLU). Setelah peralihan status menjadi Universitas pada tahun 2013, organisasi dan tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai PTK-BLU dan perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri memberikan kesempatan kepada UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional yang dikelola dengan manajemen organisasi yang baik (*good governance*) dan menitikberatkan pada peningkatan mutu (*quality assurance*).

Berdasarkan arah pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP tahun 2015-2034), maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus Menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai universitas yang modern dalam keislaman, kebangsaan dan keuniversalan sehingga dapat berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan bangsa serta dapat menghadapi tantangan global di abad ke 21 yang semakin kompetitif dan dinamis.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019), UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah memulai langkah transformasi dalam memperbaiki tata kelolanya dengan menggunakan sistem manajemen organisasi dengan target yang terukur. UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang sudah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Remunerasi BLU dan Sistem Kontrak Indikator Kinerja Utama (IKU). Sejak tahun 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menerapkan sistem E-IKU untuk mengukur kinerja tenaga kependidikan dan E-LKD (Laporan Kinerja Dosen) untuk mengukur beban kerja dosen.

Perubahan ke sistem digital ini diharapkan menjadi dasar pengembangan tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang modern di masa depan.

Posisi LPM UIN AR-Raniry bandar Aceh terlihat dalam penjelasan tentang programnya memberikan pembinaan kompetensi terhadap dosen maupun terhadap tenaga kependidikan, arah kampus yang diharapkan menuju world class university maka berbagai program harus dirancang secara sistematis. “Kami membantu dosen untuk menjadi staf pengajar yang baik dan dapat mengikuti perkembangan di bidang mereka. Setiap tahun kami mengadakan pelatihan kepada dosen terutama dosen muda agar mereka mampu menjalankan tugas pengajarannya dengan baik seperti pendekatan pembelajaran yang konstruktivis diimana pembelajaran tidak hanya berceramah (*spoon-feeding*), tetapi juga menggunakan pendekatan yang membuat mahasiswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dengan cara *inquiry*, *cooperative/collaborative*, pengaitan pembelajaran dengan alam nyata, pengajaran konsep, pemeliharaan rasa ingin tahu (*curiosity*) mereka, penghargaan terhadap bakat awal mereka, *critical thinking*, *problem solving*, *higher order thinking skills*, dst. Dalam pelatihan ini mereka juga diajarkan bagaimana merancang pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, mengevaluasi, memanfaatkan sumber pembelajaran, mengelola pembelajaran dst termasuk membuat RPS, dsb.

Peningkatan karir dosen menjadi sangat penting dalam mewujudkan kampus yang baik dan berdaya saing, karena itu pola peningkatan karir dosen menjadi begitu urgen, yang dilaksanakan LPM UIN AR-Raniry antara lain. “Mengadakan training atau workshop di atas juga mengembangkan karir mereka. Di LPM ada Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu. Tugas Kapus ini adalah mengurus sertifikasi dosen, pada kadar tertentu, membantu mengurus persyaratan remunerasi, melatih mereka sebagai asesor internal, memberi pendampingan penulisan karya

ilmiah dst. Semua itu adalah membantu pengembangan karir mereka. Juga, memberi konsultasi menyangkut sertifikasi dosen dll. untuk mendapatkan hak mereka sebagai dosen.”

Training yang sudah dilakukan seluruhnya untuk peningkatan kualitas akademik di lingkungan perguruan tinggi, termasuk dalam karya tulis ilmiah serta berbagai pelatihan. “Sebagaimana saya katakan tadi seperti pelatihan dosen muda untuk kepentingan pengajaran, pendampingan penulisan karya ilmiah, pelatihan asesor internal, adm, dll. Ini semua merupakan bantuan yang diberikan LPM untuk pengembangan staf akademik.” Jadi, pengembangan dosen melalui pelatihan menyangkut pengajaran dan administrasi merupakan bantuan yang sangat berarti bagi dosen atau staf akademik.

LPM UIN Ar-Raniry sangat berkontribusi besar terhadap peningkatan suasana akademik kampus terlebih lagi dalam mewujudkan dari capaian borang akreditasi 9 kriteria tersebut “Kami sebenarnya kaki tangan Warek I. Jadi yang kami kerjakan sebenarnya tugas Warek I yang lebih kepada pengembangan Akademik seperti menyangkut penyusunan dokumen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional), akreditasi prodi dan institusi dan juga pengembangan mahasiswa seperti program pelatihan jurnalistik, job-fair dll. Melalui job-fair kami menjembatani antara lulusan dan employer. Kalau boleh dikatakan, kami memainkan peran penting dalam memajukan UIN Ar-Raniry menuju sebuah institusi yang diperhitungkan secara nasional dan bahkan internasional.”

4.2. Peran Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah dalam Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sejak itu Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) telah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi dan dalam implementasi SPM-PT berkembang secara bervariasi di setiap perguruan tinggi, mengikuti kondisi dan perkembangan institusi masing- masing.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Penegasan penerapan SPMI tercantum dalam beberapa regulasi seperti UU Nomor 12 tahun 2012, Permendikbud Nomor 50 tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan SPMI dengan siklus PPEPP paling lambat terhitung pelaporan 31 Desember 2017. Beberapa perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dan sebagian masih dalam proses pengembangan dokumen SPMI.

Menyahuti penegasan tersebut, UIN Ar-Raniry terus melakukan berbagai upaya terkait sistem penjaminan mutu, di antaranya meningkatkan peran dan fungsi serta anggaran dalam mendukung program Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry. Pada tahun 2018 ini LPM UIN Ar-Raniry sedang menyelesaikan beberapa dokumen pelaksanaan SPMI, salah satunya adalah dokumen manual SPMI. UIN

Ar-Raniry terus menyesuaikan semua dokumen SPMI dengan tuntutan regulasi, seperti perubahan dan pengembangan siklus SPMI dari model PDCA ke PPEPP. Undang-Undang No. 44 tahun 2015 mengatur pelaksanaan SN-Dikti dengan menerapkan manajemen Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP). Penetapan standar oleh perguruan tinggi harus melampaui SN-Dikti baik, secara kuantitas maupun kualitas. Pelaksanaan standar dimulai dari tahap membangun SPMI. Implementasi PPEPP akan menghasilkan *continuous quality improvement* pendidikan tinggi.

Strategi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Ar-Raniry sedang menyesuaikan dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti. Implementasi SPMI diawali dengan ketersediaan dokumen SPMI, yang terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, Formolir SPMI, dan sejumlah SOP. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan dalam upaya meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas dua, yaitu system penjaminan mutu internal, yang dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Sistem penjaminan mutu yang kedua adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan Good University Governance (GUG) di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan. Karenanya perlu dipahami dan dihayati dengan baik visi misi yang ditetapkan perguruan tinggi. Manual mutu pendidikan tinggi adalah salah satu dokumen SPMI yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar oleh para pihak pada semua elemen terkait di dalam Pendidikan tinggi.

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar yang akan dilaksanakan pada UIN Ar-Raniry dengan berpedoman kepada standar yang ditetapkan pendidikan tinggi dan menyesuaikan dengan visi misi, dan tujuan dan sasaran UIN Ar-Raniry. Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Ad Hoc, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor. Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UIN Ar-Raniry.

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UIN Ar-Raniry yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor. Luas lingkup manual dan penggunaannya manual penetapan standar ini

berlaku ketika sebuah standar pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dalam penetapan SPMI UIN Ar Raniry. Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar masing-masing standar. Secara umum, penetapan dan pemenuhan standar dilakukan mengikuti mekanisme yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standar mutu disusun mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN Ar Raniry dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar, terlebih dahulu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar, di samping merujuk pada standar yang ditetapkan sebelumnya, juga merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait, yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
6. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggotakan antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat

menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

7. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
8. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementasinya, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
9. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
10. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas, dan standar pada tingkat universitas disahkan oleh Pimpinan UIN Ar-Raniry setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan standar mengikuti kaidah *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree (ABCD)*. *Audience* adalah pelaku atau pengelola standar yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar. *Behaviour* adalah menjelaskan kondisi atau situasi tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur. *Competence* adalah menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behavior*) yang telah dirumuskan. *Degree* adalah menetapkan waktu/periode untuk mencapai tujuan standar atau melaksanakan standar tersebut.

4.3 Lembaga pengelola Akreditasi UIN Sumatera Utara

UIN Sumatera Utara sebagai kampus besar dan posisinya sangatlah strategis, maka akreditasi menjadi bagian penting dalam mengembangkan kampus. Dalam menahkodai tugas ini di UIN Sumatera Utara Medan secara kelembagaan berada di LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) sama halnya dengan perguruan tinggi yang lain. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu pendidikan tinggi.

Setiap Perguruan Tinggi dituntut untuk bekerja dengan mengacu kepada standar mutu. Perguruan tinggi yang bermutu umumnya lahir karena komitmen luar biasa para pemimpinnya, bersama para dosen, tenaga kependidikan, juga para mahasiswanya. Yaitu suatu komitmen tinggi yang kemudian diwujudkan secara jelas dalam visi, misi, tujuan, rencana strategis, standar yang ingin capai, kepemimpinan, organisasi, sumberdaya serta kerjasama. Untuk meningkatkan mutu perannya dalam dunia akademik dan sosial, UIN Sumatera Utara Medan terus berbenah diri sejarah tahun 2014 yang lalu alih bentuk menjadi Universitas Negeri. Apalagi UIN Medan ini sangay konsern dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan yang secara teknis disebut *Wahdatul 'Ulum*. Maka dari itu Universitas ini bukan hanya lembaga pengajaran (teaching institution) atau lembaga yang hanya mengalihkan pengetahuan yang telah menjadi standar, apalagi membuat dikomitasasi ilmu pengetahuan, melainkan sebuah perguruan tinggi di mana seluruh aktivitas civitas academica-nya mencurahkan perhatian penuh pada upaya-upaya menciptakan dan memajukan ilmu pengetahuan. Menyadari faktor-faktor di atas, maka mengisyaratkan UIN sudah waktunya

mengambil peran akademik yang lebih besar. Dalam rangka mengkonsolidasikan diri sejalan dan mendukung sebagai universitas integrasi ilmu dan riset. Dalam Organisasi Tata Kerja UIN Sumatera Utara dalam penjaminan mutu tersebut organisasi ini dipimpin oleh Ketua LPM dibantu Sekretaris dan Kepala Pusat.

4.4. Manajemen dan Strategi PT Dalam Akreditasi 9 Kriteria

Strategi menghadapi akreditasi 9 kriteria harus menuntut kolaborasi yang baik terkhusus dari UPPS sebagai pengelola program studi di perguruan tinggi. Perannya begitu penting karena prodi yang mengetahui secara utuh perjalanan dan capaian yang mereka dapatkan, Adapun pada tingkat LPM di UIN Ar-Raniry memberikan monitoring dan pemdampingan dalam hal penyelesaian boring akreditasi. (Wawancara, 5 Agustus 2022). Terkait manajemen yang dilakukan oleh pengelola dalam merampungkan laporan akreditasi ini maka akan di telusuri beberapa hal, yang keseluruhannya mendukung data pelaporan boring akreditasi 9 kriteria itu. Antara lain manajemen prodi terhadap sumber daya manusia. (Wawancara, 5 April 2022). Peran sumber daya manusia sangat penting bagi kemajuan organisasi, organisasi dengan model yang lebih moderat menekankan pada fungsi sumber daya manusia dengan orientasi jangka Panjang. Mengelola sumber daya manusia di era globalisasi bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai macam strategi bahkan infrastruktur perlu disiapkan untuk mendukung proses terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. (Wawancara, 5 Agustus 2022).

Ar-raniry sebagai perguruan tinggi Islam, apabila ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan pendidikan tinggi Islam merupakan suatu upaya

perbaiki seluruh sistem pendidikan tinggi Islam sebagai konsekuensi dari identitasnya yang berciri khas agama Islam. Tantangan di era globalisasi menuntut respon tepat dan cepat pengembangan sistem pendidikan tinggi Islam secara keseluruhan termasuk peningkatan profesionalisme dosen. Jika perguruan tinggi Islam tidak hanya sekedar survive di tengah persaingan global yang semakin tajam, ketat dan kompetitif. Mutu sumber daya manusia merupakan persoalan yang paling kritis dalam dunia pendidikan tinggi tak terkecuali pendidikan tinggi Islam. Persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia pendidikan tinggi Islam berupa kekurangan dosen berkualitas; bukan saja dalam arti kesenjangan linieritas, melainkan pada kekurangan kompetensi dan idealisme. Oleh karena itu institusi pendidikan tinggi harus memiliki pusat pengembangan SDM yang lebih bagus, terencana dan terukur. (Wawancara, 5 Agustus 2022).

Pada isian borang akreditasi itu dalam manajemen sumber daya manusia, maka pendidikan tinggi Islam ini harus mampu menjadi *agent of change* tanpa menghilangkan ciri keislamannya. Usaha pengembangan dosen di perguruan tinggi Islam harus mampu meningkatkan kemampuan dosen yang berorientasi kepada integrasi ilmu keislaman, sains, dan teknologi serta sesuai dengan kebijakan nasional pengembangan PTKIN. (Wawancara, 5 Agustus, 2022). Disamping perlu dikembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, para dosen harus diperkuat dengan berbagai metode dan pendekatan baru dalam *Islamic studies*, *humanities*, dan ilmu-ilmu sosial, sedangkan prodi umum/fakultas umum-baik dalam bentuk *wider mandate* maupun universitas-perlu dibekali muatan-muatan spritualitas dan moral keagamaan yang lebih kritis dan terarah dalam format *integrated curriculum*, dan bukannya *separated curriculum* seperti yang berjalan

selama ini. Melahirkan dosen yang profesional dan budaya akademik yang kuat untuk memajukan lembaga diperlukan peran manajer pendidikan. Para manajer yang dimaksud di sini adalah para pemimpin di berbagai lapisan Lembaga, termasuk pengelola program studi. (Wawancara, 5 Agustus 2022). Pimpinan Pendidikan tinggi itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengarahkan, memberi bimbingan, mengontrol, atau evaluasi, melainkan juga memberikan kekuatan penggerak. Kekuatan penggerak yang dimaksud adalah selalu menguatkan dan memperbaharui etos kerja, cita-cita, imajinasi-imajinasi secara terus menerus Pengembangan dosen di UIN Ar-Raniry harus dilakukan secara komprehensif dan utuh. (Wawancara, 5 Agustus 2022).

Buchori Muslim sebagai sekretaris LPM menguraikan bahwa di UIN Ar-Raniry penyelesaian borang akreditasi sudah sistematis. Hal ini diperkuat bahwa dalam program studi beberapa dosennya sudah menjadi asesor Ban PT. pada aspek pengelolaan sumber daya manusia prodi sudah sangat maksimal. Jika dilihat pengembangan sumber daya manusia dari sisi kepribadian, produktivitas dan kreativitas, yang keseluruhannya untuk pengembangan prodi dan memaksimalkan capaian penilaian boring akreditasi maka dosen-dosen pada prodi sudah banyak yang memiliki capaian yang membanggakan sehingga pada pelaporan boring akreditasi nilai yang diperoleh sangat baik. (Wawancara, 5 Agustus 2022).

Tantangan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dalam meningkatkan kualitas akademik, maka manajemen sumber daya manusia menjadi bagian penting terkait pengembangan perguruan tinggi. Dalam wawancara dengan dosen di UIN Sumatera Utara menyatakan bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi atau

institusi manusia beraktivitas di masa depan termasuk diperguruan tinggi adalah untuk menciptakan organisasi atau institusi yang semakin beragam, tetapi sekaligus menuntut manajemen yang semakin efisien, efektif dan produktif. Begitu juga harus pula diterima pendapat bahwa ketergantungan organisasi pada manajemen sumber daya manusia yang semakin bermutu tinggi akan semakin besar pula. Tanpa mengurangi pentingnya perhatian yang tetap harus diberikan pada manajemen sumber-sumber organisasional lainnya, tidak bisa di sangkal bahwa perhatian utama harus diberikan pada manajemen sumber daya manusia. Untuk mewujudkan situasi demikian, perlu peningkatan kesadaran tentang maksud dari semua kegiatan manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan sumbangan sumber daya manusia terhadap keberhasilan institusional.

4.5 Tantangan PT Dalam Akreditasi 9 Kriteria

Beberapa tantangan yang dihadapi manajemen SDM di UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh bisa dikategorikan dalam dua kontrasi yakni tantangan yang bersumber dari internal perguruan tinggi, sekaligus tantangan yang bersumber dari lingkungan eksternal perguruan tinggi dimana berada. Mengelaborasi berbagai tantangan internal perguruan tinggi dalam aktivitas manajemen SDM perguruan tinggi tidaklah terlalu rumit. dinyatakan ada beberapa tantangan internal perguruan tinggi dalam manajemen SDM dosen, antara lain; 1) rencana strategi, 2) anggaran, 3) estimasi lulusan, 4) usaha atau kegiatan baru, dan 4) rancang bangun institusi dan tugas pekerjaan. (Wawancara, 2022).

Alasan lainnya adalah manajemen SDM pada UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh memulai dari target apa yang akan

dicapai perguruan tingginya, misalnya kebanyakan di Indonesia perguruan tinggi memiliki cita-cita menuju *world class university* (WCU). Perguruan tinggi lainnya mungkin terdepan dalam teknologi, pelopor peradaban, sampai membentuk insan yang bertakwa dan berkarakter. Dari target dan capaian yang ingin diraih perguruan tinggi, turunan identifikasi tantangan ke depannya akan lebih mudah diurai, seperti yang dijelaskan Kusumastanto (Ketua Komisi D Norma dan Kajian Strategis, SA Institut Pertanian Bogor/IPB) bahwa perguruan tinggi yang memiliki cita-cita mencapai WCU, tantangan manajemen sumber daya manusia perguruan tinggi tersebut kesulitan mengadopsi sistem nilai-nilai yang bertaraf *world class university* untuk dikembangkan dengan sungguh-sungguh baik dalam instrumen legal sampai terbentuknya budaya berkualitas global (*global quality culture*).

Budaya berkualitas global itu bisa di inventarisir diantaranya adalah etika akademik yang mengandung nilai moralitas (sistem nilai baik dan buruk) harus dimiliki oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan di bidang akademik. Tantangan manajemen SDM perguruan tinggi yang mengedepankan target pembentukan insan yang bertakwa dan berkarakter—perguruan tinggi tersebut harus dapat meletakkan basis yang kuat melalui pembangunan karakter dosen yang memiliki etika akademik dengan ciri-ciri rasional, obyektif dan normatif. Etika akademik tersebut harus menjadi unsur fundamental moralitas dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya dan Iptek (Wawancara, 2022). Sehingga selain tanggung jawab individu yang mengutamakan kompetensi profesional, kejujuran, integritas dan obyektivitas serta sebagai institusi perguruan tinggi harus mampu mempertanggung jawabkan ke publik, hormat kepada martabat dan hak azasi manusia serta dapat menjadi sumber acuan budaya luhur bangsa

Indonesia. Tantangan-tantangan manajemen SDM perguruan tinggi, sekaligus menghadirkan kebutuhan untuk mencapai world class university dengan cara; 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, etika, estetika, prinsip kebenaran dan kejujuran ilmiah, sehingga tidak terjadi illegal teaching; plagiat intelektual; 2. Menjaga standar professional dan standar ilmiah yang tinggi secara berkelanjutan setingkat dengan universitas kelas dunia; 3. Tidak melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan kegiatan akademik; 4. Menciptakan lingkungan belajar mengajar yang berkualitas dan bertaraf internasional; 5. Mengembangkan dan menerapkan iptek yang bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa dan seluruh umat manusia; 6. Menghormati hukum dan hak azasi manusia maupun tidak merusak lingkungan hidup dengan sewenang-wenang; 7. Mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bertaraf internasional (Kusumatasto, 2008;1-3).

Upaya perbaikan terus menerus dilakukan diantaranya dengan tetap konsisten terhadap peningkatan pencapaian sasaran strategis UIN Ar-Raniry dalam perspektif internal yaitu:

1. Kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter *Responsible, Excelent, Scientific Rigor, Profesional, Encouraging, Creative dan Trust (Rerpect)*;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan berdaya guna; dan
4. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik;

Keseluruhan program kerja dalam tiap sasaran strategis saling terkait dan melengkapi dan keberhasilannya ditentukan oleh komitmen seluruh elemen yang terlibat dalam pencapaian tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pencapaian peningkatan indeks kepuasan mahasiswa ini merupakan wujud dari komitmen seluruh elemen organisasi UIN Ar-Raniry untuk mencapai pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas, efektif dan efisien. (Wawancara, 2022).

Peningkatan kinerja dan kompetensi SDM menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan perguruan tinggi. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa sumberdaya manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi SDM di antaranya dengan program strategis Kepemimpinan, Integritas dan Talenta Akademik (KITA) bagi pendidik dan program Profesional dan Inovatif di bidang Manajemen dan Administrasi (PRIMA). Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja SDM di antaranya dengan pemberian reward berupa insentif kinerja berdasarkan capaian kinerja individu. Sementara kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dilakukan dengan kegiatan peningkatan kualifikasi dosen hingga jenjang doktor, sertifikasi pelatihan manajemen dan kepemimpinan dosen serta peningkatan reputasi akademik dosen dengan program ALG (*Academic Leadership Grant*), dan sertifikasi profesional serta program inpassing jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan dengan harapan setiap capaian kinerja individu dari tenaga kependidikan terukur sesuai dengan kompetensinya. (Wawancara, 2022)

Pengembangan SDM di UIN Sumatera Utara Medan, bahwa setiap tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan yang telah

diterima sebagai CPNS wajib mengikuti kegiatan prajabatan. Kegiatan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan orientasi dan wawasan terkait dengan bidang tugasnya masing-masing di Universitas. Pada kegiatan tersebut juga disampaikan materi perencanaan karier sebagai acuan pengembangan diri setiap tenaga pendidikan dan kependidikan. Dengan demikian, setiap SDM UIN Medan telah memiliki rencana pengembangan karier serta kontribusinya bagi peningkatan reputasi kampus. Pengembangan karier tenaga pendidik UIN Sumatera Utara Medan mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku bagi tenaga pendidik PNS pada saat ini, baik jabatan, golongan dan penghitungan angka kredit. Hal tersebut tertuang dalam Buku Pegawai Negeri Sipil UIN Sumatera Utara Medan. Buku tersebut memuat peraturan kepegawaian diantaranya penghitungan angka kredit sebagai bagian dari pengembangan karier. (Wawancara, Medan 2022).

Sementara itu, untuk Karier Tenaga kependidikan UIN Sumatera Utara Medan didorong untuk mengisi beragam jabatan fungsional tertentu. Namun, formasi jabatan fungsional di perguruan tinggi sedikit berbeda dengan formasi yang ditetapkan secara nasional. Ini didasarkan pada kebutuhan dan kapasitas tenaga kependidikan yang ada di UIN Medan. Dalam pengaturan jabatan fungsional di UIN Medan, pihaknya merumuskan konsep pohon kebiasaan (*profession tree*). Dalam konsep ini, ada tiga jalur berjenjang formasi jabatan fungsional, yaitu *operating* (teknisi) atau formasi yang cocok ditempati jabatan fungsional terampil; *utilizing* (pemanfaat) atau formasi untuk jabatan pemanfaat ahli dan analis; dan *managing* (pengelola), atau formasi untuk jabatan pimpinan tertinggi. (Wawancara, 2022).

Setiap jabatan fungsional yang ada di UIN Medan harus memiliki jenjang karier yang jelas. Bahkan, untuk tingkat jabatan fungsional

terendah sekalipun. Upaya ini untuk mendorong tenaga kependidikan memiliki motivasi dan cita-cita yang harus dicapai. Mengimplementasi konsep pohon, selain memiliki tingkatan karier yang jelas, jabatan fungsional di UIN Medan juga bersifat cangkokan. Konsep cangkokan ini memungkinkan tenaga kependidikan berpindah ke jabatan fungsional tertentu. Hanya saja, konsep cangkokan ini hanya untuk jabatan tertentu. Untuk jabatan fungsional terampil akan diisi oleh tenaga kependidikan yang diarahkan kepada urusan operasional dengan spesialisasi khusus di tiap unit kerja masing-masing. (Wawancara, 2022),

Khusus Tenaga Pendidik, UIN Sumatera Utara Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi memberikan perhatian besar kepada pembinaan dan pengembangan SDM dosen. Hal tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa dosen merupakan faktor penentu dan pelaku utama pelaksanaan kegiatan Triharma Perguruan Tinggi. Pembinaan dan pengembangan SDM dosen yang terarah dan terencana mampu memacu setiap dosen untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yang berimplikasi pada peningkatan eksistensi dan kinerja UIN Medan dalam mewujudkan visi dan misinya. Aspek pembinaan dan pengembangan SDM Dosen di UIN Medan yang telah dilakukan, yaitu:

Pendidikan Lanjutan Program Doktor

Kebijakan pembinaan dan pengembangan melalui pendidikan studi lanjut diarahkan kepada perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya terdapat prioritas kebijakan penugasan pendidikan lanjutan, yaitu: a. Penugasan pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi terkemuka di luar negeri bagi dosen-dosen yang berusia kurang dari 40 tahun dan telah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta oleh universitas-universitas tersebut; b. Penugasan pendidikan lanjutan ke

perguruan tinggi terkemuka di dalam negeri, terutama bagi dosen-dosen yang berusia lebih dari 40 tahun yang berkendala untuk pendidikan lanjutan ke luar negeri, namun berpotensi untuk berkembang; Pada klausul ini juga meski studi di dalam negeri, namun disyaratkan memiliki satu orang pembimbing dari luar negeri.

Pembinaan dan pengembangan SDM dosen dilakukan dalam berbagai bentuk, dukungan, seperti : a. Pengarahan dan dorongan secara terus-menerus oleh setiap pimpinan universitas/ departemen/fakultas/prodi/ laboratorium; b. Penyediaan dana bagi pelatihan dan tes Bahasa Inggris/bahasa asing lainnya. Kebijakan tersebut ditempuh terutama bagi dosen yang telah diterima pendidikan lanjutan di perguruan tinggi luar dan dalam negeri tertentu yang mensyaratkan penguasaan Bahasa Inggris/ bahasa asing lainnya; dilakukan oleh UPT-Kebahasaan; c. Pemanfaatan program-program kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi/ kelembagaan di luar negeri. Saat ini UIN Medan telah melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau kelembagaan di luar negeri; d. Penyediaan dana bagi pendidikan lanjutan Program Doktor baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan tersebut terutama diperuntukkan bagi dosen-dosen yang telah diterima dan atau tengah menjalani pendidikan lanjutan namun memiliki hambatan dalam pendanaan. (Wawancara, 2022).

Pelatihan dan Penataran

Kegiatan dan pelatihan dan penataran yang terkait langsung dengan aspek Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan langsung oleh UIN Medan secara rutin dan terjadwal setiap tahun. Kegiatan ini diikuti oleh dosen sebagai perwakilan fakultas/departemen/prodi dan bersifat wajib bagi yang belum berkesempatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pelatihan proses belajar mengajar (seperti Penataran Pengembangan Kerampilan Dasar

Teknik Instruksional/ Pekerti, Applied Approach/ AA, e-learning, Penulisan Buku Ajar, dan Problem Base Learning), pelatihan penelitian (seperti Metodologi Penelitian, Penyusunan Proposal Berbasis Hibah Penelitian, Pelatihan bahasa Asing, Pengolahan Data dan Statistika, dan Penulisan Karya Ilmiah), serta pelatihan-pelatihan penunjang (seperti Bahasa Inggris, *Information and Communication Technology (ICT)*, Manajemen dan Kepemimpinan, dan Pembinaan Kemahasiswaan dan lain-lain. (Wawancara, 2022).

UIN Medan juga mendukung dosen-dosennya untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain; selain juga pelatihan yang diselenggarakan oleh UIN Medan yang bersifat berkala. Pada umumnya, kegiatan pelatihan seperti itu lebih bersifat spesifik keilmuan. Dukungan yang diberikan pada umumnya dalam bentuk penyediaan dana untuk pendaftaran, akomodasi, transportasi; tergantung pada jenis kegiatan pelatihannya. Partisipasi dosen dalam kegiatan-kegiatan pelatihan seperti itu diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM dosen UIN Medan utamanya dalam hal pengembangan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dosen sesuai dengan bidang keilmuannya.

BAB IV

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan antara lain:

- a. Strategi paling utama yang dilakukan dua universitas yakni UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-raniry terkait penyusunan Borang akreditasi 9 kriteria dengan memaksimalkan peranan Lembaga Penjamin Mutu (LPM). Posisi LPM pada dua perguruan tinggi diatas memiliki tugas yang sama terkait penjaminan mutu, Menyusun rencana-rencana strategis terkait pengendalian mutu, melaksanakan evaluasi dan menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas perguruan tinggi. LPM juga memastikan bawa dokumen-dokumen yang terkait penguatan akreditasi 9 kriteria telah tersedia baik pada tingkat unit, program studi maupun tingkat universitas.
- b. Strategi lain dalam memenuhi isian borang akreditasi 9 kriteria tersebut UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengotimalkan kegiatan Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai pelaksanaanya juga LPM pada msing-masing universitas. Landasan hukum yang mengatur penjaminan mutu tertuang dalam Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara terang benderang bahwa penjaminan mutu Pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan. UIN

Sumatera Utara Medan dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan hasil temuan secara langsung, sudah sejak lama melakukan pengawasan dan penjaminan mutu pada masing-masing perguruan tinggi, dan indikator yang dipakai mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Undang-Undang No. 44 tahun 2015 mengatur pelaksanaan SN-Dikti dengan menerapkan manajemen Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP). Implementasi PPEPP akan menghasilkan *continuous quality improvement* pendidikan tinggi untuk menghasilkan akreditasi unggul.

- c. UIN Sumatera Utara dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, saat ini tengah menyelesaikan konversi akreditasi. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan adanya Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK). ISK adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Program Studi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0.
- d. Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh ditemukan sejumlah hambatan Dalam mewujudkan akreditasi unggul maupun tuntutan sisian boring akreditasi 9 kriteria antara lain: (a) Kurangnya tenaga Adminitrasi di Prodi. (b) Pengerjaan Administrasi di Prodi dibantu oleh Dosen yang diperbantukan. (c) Tidak semua prodi aktif dalam mengupdate Website

mereka. (d) Kesadaran Kerja sama unit belum merata. Disamping itu terdapat juga factor tantangan yakni. (a) RDM (Rasio Dosen dan Mahasiswa). (b) Jumlah SDM tenaga Kependidikan. (c). Meng-upgrade rekognisi dosen hingga level internasional. (c) Perolehan Hak Paten yang masih sulit. (d) Meningkatkan Daya Saing Alumni.

- e. Sedangkan pada UIN Sumatera Utara dalam mewujudkan universitas terakreditasi unggul, ditemukan beberapa hambatan dalam isian boring akreditasi 9 kriteria. Antara lain: (a) Kecepatan masing masing Prodi tidak sama. (b) Tenaga kependidikan di prodi secara struktur tidak ada, Sehingga Prodi tidak punya staf. (c) Pengerjaan Administrasi di Prodi dibantu oleh Dosen yang diperbantukan. (d) Tidak semua prodi aktif dalam mengupdate Website mereka. Sementara itu tantangan pegruan tinggi ini kedepan terkait. (a) RDM (rasio Dosen dan Mahasiswa). (b) Jumlah SDM tenaga Kependidikan. (c) Kualitas SDM. (d) Mahaiswa Luar Negeri. (e) Meningkatkan Daya Saing Alumni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2003. *Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data*. ndi Offset. Yogyakarta BAN- PT. 2008
- Aedi, Nur. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama.
- Andi. Yogyakarta. Mulyanto. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2017b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2017c. Panduan Penggunaan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) Versi 01 Untuk Pengguna Perguruan Tinggi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Jakarta
- Djodjodibroto, R. Darmanto. 2004. *Tradisi Kehidupan Akademik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Dipojono, Hermawan Kresno. (2014). Membangun Budaya Akademik Melalui Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik, diakses tanggal 20 Agustus 2022, dari <http://dikti.go.id/blog/2014/03/11/membangunbudaya-akademik-melalui-tata-kelola-perguruan-tinggi-yang-baik/>
- Icksan, M. Achmad. 2000. *Mahasiswa dan Kebebasan Akademik*. Yogyakarta: Hanindita
- Kistanto, Nurdien H. 2000. *Budaya Akademik: Kehidupan dan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia*. Jakarta: Dewan Riset Nasional, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.

- Indrajit, & Djokopranoto. 2006. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Idrajani. 2011. *Perancangan Basis Data All in 1*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Partologi, Joshua. 2015. *Manajemen Modern dengan SCRUM*.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Rian. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Supriadi, Dedi 1997. *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Bandung, RemajaRosdakarya.
- Shulhan, Muwahid, dan Soim. 2013. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras Pustaka

